

Dinamika sejarah lahirnya Pancasila: Peran tokoh- tokoh bangsa dalam merumuskan Pancasila

Septya Ramadhani

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: septyar93@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, dasar negara, tokoh bangsa, panitia sembilan, BPUPKI-PPKI.

Keywords:

Pancasila, national principle, national figure, committee nine, BPUPKI-PPKI.

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia, tidak hanya sekedar dijadikan simbol atau teori, namun lebih dari pada itu. Pancasila juga pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dan ide para tokoh-tokoh untuk membentuk perumusan dasar negara. Dalam proses perumusannya sangat dipengaruhi oleh peran beberapa tokoh diantaranya Soekarno, Moh Yamin, Soepomo dan juga Panitia Sembilan. Namun di dalam proses perumusan ini juga terdapat beberapa perbedaan pandangan diantaranya kelompok nasionalis dan kelompok islam yang kemudian tertuanglah pendapat untuk membentuk panitia sembilan. Bentuk penelitian ini menggunakan metode literasi sejarah, dokumen resmi

BPUPKI dan PPKI dan juga pidato para tokoh-tokoh bangsa. Peran para tokoh-tokoh ini tidak hanya gagasan yang mereka ucapkan tetapi juga beberapa upaya yang dilakukan untuk mempersatukan bangsa. Dengan demikian, proses perumusan pancasila lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, untuk itu pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang berkaitan dengan keberagaman dan persatuan. Jadi, dalam artikel ini, peran tokoh-tokoh bangsa dalam merumuskan pancasila dapat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini.

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state that was formed after Indonesian independence, not only as a symbol or theory, but more than that. Pancasila is also a guideline for life that must be applied in national and state life. This article aims to analyze the views and ideas of the figures to from the formulation of the basis of the state. The formulation process was greatly influenced by the roles of several figures, including Soekarno, Moh Yamin, Soepomo and also the committee of nine. However, in this formulation process, there were also several differences of opinion, including those from nationalist groups and Islamic groups, which then led to the formation of the committee of nine. This research uses historical literacy methods, official documents of BPUPKI and PPKI and also speeches by national figures. The role of these figures is not only the ideas they express but also the efforts they make to unite the nation. Thus, the process of formulating Pancasila prioritizes the interests over personal interests, therefore Pancasila is the result of a mutual agreement related to diversity and unity. So, in this article, the role of national figures in formulating Pancasila can influence the life of the nation and state to this day.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri lima prinsip utama, serta memiliki peran penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang mempersatukan keanekaragaman bangsa serta cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mengandung nilai-nilai penting yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta harus tertanam dalam diri setiap warga Indonesia serta harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara (Sutomo et al., 2021). Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Rampai). Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dari dalam diri bangsa Indonesia. Nilai ini dijadikan sebagai landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan dalam kehidupan sehari-hari maupun kenegaraan. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila merupakan “dasollen” atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan.

Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan UUD 1945. Proses lahirnya Pancasila memerlukan waktu dan pemikiran yang panjang. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa peran tokoh bangsa, diantaranya Soekarno, Moh Yamin, Soepomo, dan juga Panitia Sembilan. Dengan demikian, seluruh warga negara perlu memahami makna yang terkandung dalam sila Pancasila agar dapat menjalankan nilai positif yang terkandung dalam sila nilai tersebut sehingga dapat menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai aspek sosial, ekonomi, maupun politik yang terjadi dalam bangsa.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan suatu hasil dari pemikiran manusia yang dituangkan dalam rumusan rangkaian kalimat yang mengandung makna untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan bersama.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis peran para tokoh-tokoh bangsa dalam proses perumusan Pancasila serta menjelaskan bagaimana kontribusi pemikiran mereka hingga mampu membentuk dasar negara yang mempersatukan bangsa, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Melalui artikel ini, diharapkan Masyarakat Indonesia dapat lebih menghargai perjuangan para tokoh-tokoh bangsa serta mampu mengimplementasikannya nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga persatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Pembahasan

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang berisi nilai-nilai luhur yang terbentuk dari kebudayaan masyarakat Indonesia dan berkembang dalam negara Indonesia (Toyo). Pancasila sebagai dasar negara lahir melalui proses yang panjang serta melibatkan banyak tokoh-tokoh bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya sekedar menjadi simbol atau teori, tetapi juga menjadi simbol atau teori yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Faslah, 2025). Proses perumusan Pancasila berawal dari Jepang yang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan lalu dibentuklah badan yang bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Sidang ini berlangsung pada tanggal 28 Mei- 1 Juni 1945 yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia (Burlian, 2020). Dalam sidang ini para tokoh bangsa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, diantaranya:

1. Mr. Muhammad Yamin

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengemukakan lima asas yang dianggap sebagai fondasi bagi berdirinya negara, yaitu: Peri Kebangsaan, yang berarti negara Indonesia harus berdiri di atas jati diri dan karakter bangsa sendiri tanpa meniru bangsa lain; Peri Kemanusiaan, yang menegaskan pengakuan terhadap bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya; Peri Ketuhanan, yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan kehidupan moralnya berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Peri Kerakyatan, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait urusan kenegaraan; serta Kesejahteraan Rakyat, yang menggambarkan cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial dan negara yang makmur bagi seluruh rakyat. Gagasan yang dikemukakan oleh Yamin ini memperlihatkan semangat nasionalisme dan persatuan, sekaligus menegaskan pentingnya nilai kemanusiaan serta kesejahteraan bersama. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu landasan dalam proses perumusan sila-sila Pancasila, yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan di tengah keberagaman (Nasution, 2024).

2. Prof. Dr. Soepomo

Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada 31 Mei 1945, Soepomo mengemukakan pandangan yang berbeda dari gagasan Moh. Yamin. Ia menegaskan bahwa dasar negara Indonesia merdeka seharusnya dibangun berdasarkan karakter dan jati diri bangsa sendiri. Soepomo menolak konsep kebudayaan Barat yang berlandaskan pada individualisme, karena menurutnya paham tersebut berpotensi menumbuhkan sikap saling bersaing di antara sesama warga negara. Ia kemudian mengajukan lima prinsip yang menjadi gagasan dasar

negara, yaitu: Persatuan, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang utuh; Kekeluargaan, yang menekankan penyelenggaraan negara secara harmonis dan penuh kebersamaan; Keseimbangan Lahir dan Batin, yakni upaya menjaga keselarasan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan berbangsa; Musyawarah, yang menegaskan pentingnya mencapai keputusan melalui mufakat; serta Keadilan Rakyat, yang berarti menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga tanpa mementingkan kepentingan individu. Berdasarkan pemikiran tersebut, Soepomo menilai bahwa Indonesia merdeka harus dijalankan atas semangat kekeluargaan dan gotong royong, dengan cita-cita mewujudkan persatuan antara rakyat dan para pemimpinnya(WIJAYANTO, 2022).

3. Ir. Soekarno

Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang terdiri atas lima pokok pikiran utama. Prinsip pertama, Kebangsaan Indonesia, menegaskan pentingnya persatuan seluruh golongan dan suku bangsa tanpa membedakan latar belakang etnis maupun agama, karena yang utama adalah rasa solidaritas untuk bersama-sama menjadi bangsa yang merdeka. Kedua, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, yang menekankan semangat solidaritas antarbangsa serta hubungan yang didasari nilai kemanusiaan universal. Ketiga, Mufakat atau Demokrasi, yakni gagasan bahwa Indonesia merdeka harus berdiri atas kedaulatan rakyat, bukan dominasi individu atau kelompok tertentu. Keempat, Kesejahteraan Sosial, yang menggambarkan cita-cita pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kelima, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan sikap saling menghormati antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa. Dalam pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa kelima prinsip tersebut merupakan dasar filsafat negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang setara dengan *weltanschauung* atau pandangan dunia. Pemikiran Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian menjadi titik awal bagi perumusan resmi Pancasila, karena menonjolkan semangat persatuan nasional serta keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial(Burlan, 2020).

Setelah berbagai tokoh bangsa menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara, BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia ini terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, KH. Abdul Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, A.A. Maramis, dan Abdul Kahar Muzakir. Tugas utama mereka adalah menyusun rancangan dasar negara Indonesia, baik melalui usulan tertulis maupun lisan, serta menampung berbagai pandangan dari beragam kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukan dasar negara(Santosa & Kurnia, n.d.).

Dari hasil kerja Panitia Sembilan inilah kemudian lahir Piagam Jakarta, yang menjadi perumusan awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai draf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencerminkan hasil kompromi antara pandangan kelompok Islam dan kelompok nasionalis dalam menentukan arah ideologis negara Indonesia merdeka (Wedakarna & Suyasa, 2022).

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadilah perubahan terhadap sila pertama Pancasila. Rumusa awal yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk- pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan disepakati setelah terjadinya dialog antara tokoh- tokoh islam dengan tokoh dari Indonesia timur. Dalam proses ini, Mohammad Hatta sangat berperan penting di dalam menyampaikan perubahan tersebut agar tidak saling menimbulkan perpecahan di antara rakyat Indonesia yang saling beragama agama. Perubahan ini menunjukkan sikap toleransi, kebesaran jiwa, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Mereka rela mengesampingkan kepentingan golongan demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Dari proses ini, maka Pancasila lahir sebagai dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia(Ubaedilah, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil perjuangan, pendapat, serta pemikiran para tokoh- tokoh bangsa yang memiliki pandangan dan latar belakang yang beragam. Perumusan ini dapat terjadi melalui proses yang panjang dengan melalui perdebatan, musyawarah, dan kompromi yang panjang dalam sidang BPUPKI hingga terbentuknya panitia sembilan. Para tokoh- tokoh, seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan para tokoh islam seperti KH. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, serta tokoh- tokoh nasionalis lainnya yang menunjukkan semangat kebersamaannya dan pengorbanan demi menemukan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan pendapat yang terjadi saat proses perumusan justru dijadikan sebagai kekuatan dalam perumusannya, karena setiap pendapat yang diajukan berpijak pada semangat nasionalisme, keadilan, dan kemanusiaan. Hasil dari berbagai perbedaan pendapat, menjadikan Pancasila lahir sebagai konsensus nasional yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia berketuhanan, berperikemanusiaan, menjunjung persatuan, mengutamakan musyawarah, dan berorientasi pada keadilan sosial. Nilai- nilai inilah yang kemudian dijadikan sebagai pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Melihat pentingnya peran para tokoh bangsa dalam merumuskan pancasila, sudah sepatutnya sebagai generasi muda penerus bangsa harus memiliki semangat pantang menyerah, karakter yang kuat, sikap disiplin yang tinggi, tanggung jawab, serta memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme untuk membangun bangsa (Adha & Susanto, 2020). Pemahaman terhadap sejarah perumusan pancasila perlu diperkuat, terutama melalui pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, agar generasi muda tidak hanya mengenal pancasila sebagai simbol negara, tetapi juga memahami maknanya sebagai pedoman hidup (Putri et al., 2025). Pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menegakkan nilai- nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila akan terus hidup dan berkembang sebagai sumber inspirasi, kekuatan pemersatu, serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Daftar Pustaka

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138.
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2), 143–169.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. *UIN Malang Press, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Nasution, K. A. (2024). *Moh. Yamin: Peran dan Sumbangsihnya bagi Indonesia*. DIVA PRESS.
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi: Mewujudkan Pancasila yang relevan di era globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Santosa, Y. B. P., & Kurnia, R. (n.d.). *Ki Bagus Hadikusumo's contribution to the BPUPKI Session in May-July 1945*.
- Sutomo, S., Miftahusyai'an, M., Al Kamil, M. S., & Mulyoto, G. P. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad Yani Jabung. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 95–104. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- Ubaedilah, I. (2021). *Pancasila Sebagai Ideologi Perikat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)(Studi Tafsir Al-Mishbâh Karya M. Quraish Shihab)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Wedakarna, S. I. G. N. A., & Suyasa, M. W. (2022). Perdebatan Hari Lahir Pancasila, Trisila, dan Ekasila Berdasarkan Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Pembedaan Pancasila*, 2(1), 36–49.
- WIJAYANTO, W. (2022). *Mengenal Lebih Dekat Tokoh Perancang Pancasila*. CV MEDIA EDUKASI CREATIVE.